

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 47 (2016) menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Setiap rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis (Kemenkes RI, 2018).

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis di dalam sarana pelayanan kesehatan rumah sakit mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan informasi serta melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap berkas rekam medis pasien. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menunjang mutu di pelayanan kesehatan dalam pemenuhan pembuatan laporan rumah sakit karena di dalam berkas rekam medis pasien tersebut berisi informasi yang digunakan sebagai sumber pertanggung jawaban laporan rumah sakit (Kemenkes RI, 2011).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 44, (2009) tentang Rumah Sakit, bahwa setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan rumah sakit di Indonesia (Indradi, 2017). Pelaporan pada rumah sakit terbagi menjadi laporan internal dan eksternal. Laporan internal merupakan laporan yang digunakan untuk kepentingan rumah sakit itu sendiri yang meliputi semua catatan kegiatan yang dilakukan di rumah sakit.

Laporan internal tersebut akan digunakan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk evaluasi kinerja, evaluasi pelayanan, menentukan target, mengetahui tren penyakit, serta pengambilan keputusan. Sedangkan laporan eksternal merupakan laporan yang digunakan untuk kepentingan instansi berwenang di atas rumah sakit, seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Laporan eksternal tersebut akan digunakan untuk evaluasi serta monitoring dalam memperbaiki kebijakan pelaksanaan dan perencanaan program yang akan datang (Mustachidah dan Yunengsih, 2021). Berdasarkan Permenkes Nomor 1171 (2011) setiap rumah sakit wajib melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).

SIRS merupakan aplikasi sistem pelaporan rumah sakit yang mampu melakukan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan yang meliputi data identitas rumah sakit, data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit, data rekapitulasi kegiatan pelayanan, data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat inap, dan data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat jalan. Pelaporan SIRS terdiri dari pelaporan yang bersifat terbaru setiap saat (*updated*) dan pelaporan yang bersifat periodik. Pelaporan yang bersifat terbaru setiap saat (*updated*) ditetapkan berdasarkan kebutuhan informasi untuk pengembangan program dan kebijakan dalam bidang perumahsakit. Sedangkan pelaporan SIRS yang bersifat periodik dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Kemenkes RI, 2011).

RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo merupakan rumah sakit umum tipe A milik pemerintah daerah Sidoarjo yang menjadi salah satu instansi pelayanan publik dalam bidang kesehatan serta menjadi rumah sakit rujukan di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo peneliti mendapatkan bahwa proses pelaporan SIRS masih terjadi keterlambatan pelaporan, dimana petugas menyetorkan laporan bulanan kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota di luar batas pengumpulan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI. RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo menetapkan jangka waktu pelaporan yang harus disetorkan setiap

bulannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Berdasarkan data yang ada di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, terdapat 19 jenis laporan yang harus disetorkan setiap bulannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi. Berikut merupakan data angka keterlambatan pelaporan pada bulan Juli sampai Desember di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo tahun 2023.

Tabel 1. 1 Jenis Laporan Bulanan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2023

No.	Jenis Laporan	
	Rawat Jalan	Rawat Inap
1		Laporan 10 Besar Penyakit RI
2	Laporan Pengunjung RS	Laporan Pengunjung RS
3	Laporan HIV	
4	Laporan Morbili	
5	Laporan Difteri	
6	Laporan AFP	
7	Laporan Chikungunya	
8	Laporan GBS	
9	Laporan Pertusis	
10	Laporan Epidemiologi	
11	Laporan Kunjungan RJ	
12	Laporan 10 Besar Penyakit RJ	
13	Laporan Keg. Program Indera Mata	
14	Laporan Keg. Program THT	
15	Laporan Keg. Program Kesehatan Jiwa	
16	Laporan Keg. Program Kesehatan Gigi	
17	Laporan P2PTM	
18	Laporan Diagnosa Gigi	
19	Laporan Tindakan Gigi	

Tabel 1. 2 Angka Keterlambatan Pelaporan Bulan Juli – Desember 2023.

Bulan	Tepat Waktu		Tidak Tepat Waktu	
	Jumlah (19 laporan)	100 %	Jumlah (19 laporan)	100 %
Juli	2	10,53 %	17	89,47 %
Agustus	4	20,06 %	15	79,94 %
September	5	26,32 %	14	73,68 %
Oktober	5	26,32 %	14	73,68 %
November	4	20,06 %	15	79,94 %
Desember	9	47,38 %	10	52,62 %
Rata-rata	4,83	25,11 %	14,17	74,89 %

Sumber : Data Rekam Medis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2023

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah keterlambatan pelaporan pada bulan Juli sampai Desember masih tinggi. Terdapat rata-rata 5 laporan dari total 19 jenis

laporan atau sekitar 25,11 % yang dikirimkan tepat waktu tiap bulannya, sedangkan rata-rata 14 laporan dari total 19 jenis laporan atau sekitar 74,89 % yang dikirimkan tidak tepat waktu tiap bulannya. Persentase keterlambatan pelaporan tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan jumlah keterlambatan 17 laporan (89,47 %), sedangkan persentase keterlambatan pelaporan terendah terjadi pada bulan Desember dengan jumlah keterlambatan 10 laporan (52,62 %).

Dampak dari keterlambatan pelaporan membuat rumah sakit sering kali mendapat teguran atau peringatan dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pihak rumah sakit mendapatkan teguran atau peringatan berupa pesan teks yang dikirimkan oleh pihak penanggung jawab dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Keterlambatan pelaporan juga menyebabkan terhambatnya pengambilan keputusan pada proses evaluasi serta *monitoring* yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit yang dilaksanakan setiap bulannya, sehingga berpengaruh terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan laporan rumah sakit yang diperlukan untuk menunjang mutu pelayanan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini sejalan dengan (Mustachidah dan Yunengsih, 2021) yang menyatakan bahwa informasi yang terdapat pada laporan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan serta perbaikan kebijakan pelaksanaan dan perencanaan program yang akan datang.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, keterlambatan pelaporan dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan teori Lawrence Green (1980). Menurut Lawrence Green perilaku seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor yakni faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pemungkin (*enabling factor*), serta faktor penguat (*reinforcing factor*) (Notoadmodjo, 2014). Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan melalui wawancara dengan petugas bagian pelaporan, dugaan sementara faktor penyebab keterlambatan pelaporan bulanan yang terjadi di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo berdasarkan faktor predisposisi (*predisposing factor*) adalah sikap dan kedisiplinan petugas yang menangani bagian pelaporan.

Sikap petugas yang masih belum patuh dalam melaksanakan pengiriman pelaporan yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman pelaporan pada bulan-bulan berikutnya. Petugas masih banyak yang mengirimkan laporan di atas tanggal 10 pada bulan berikutnya. Hasil penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa faktor *predisposing* lain yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan adalah pengetahuan dan pendidikan. Kurang pemahamannya petugas tentang sistem pelaporan rumah sakit yang berlaku saat ini juga menjadi penyebab lambatnya pembuatan laporan rumah sakit (Sari, 2013). Susanti (2018) mengemukakan bahwa standar kualifikasi pendidikan petugas rekam medis yang tidak sesuai dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang dalam ketepatan pelaksanaan pelaporan rumah sakit.

Faktor penyebab keterlambatan pelaporan bulanan yang terjadi di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo berdasarkan faktor pemungkin (*enabling factor*) adalah aplikasi SIMRS yang terkadang tidak stabil dikarenakan oleh banyaknya jumlah pengguna disaat bersamaan. Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa faktor *enabling* lain yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan adalah pelatihan kerja. Rohmani *et al.*, (2021) menyatakan bahwa pelatihan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai salah satunya dalam pelaksanaan laporan rumah sakit.

Sementara itu, faktor penyebab keterlambatan pelaporan bulanan yang terjadi di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo berdasarkan faktor penguat (*reinforcing factor*) adalah tidak adanya SOP (*Standart Operational Procedure*) yang spesifik untuk laporan bulanan pada tiap jenis laporan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa faktor *reinforcing* lain yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan adalah motivasi. Petugas yang kurang mendapatkan perhatian dan motivasi dari kepala rekam medis maupun manajemen rumah sakit mengakibatkan ketidakdisiplinan petugas dalam melaksanakan rekapitulasi laporan (Gultom, 2016).

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti perlu untuk melakukan analisis terhadap faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaporan yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Instalasi Rekam Medis di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Instalasi Rekam Medis di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pelaporan bulanan instalasi rekam medis di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo tahun 2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pelaporan bulanan instalasi rekam medis di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo tahun 2023 ditinjau dari faktor *predisposing* (Pengetahuan, sikap, kedisiplinan, dan pendidikan).
- b. Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pelaporan bulanan instalasi rekam medis di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo tahun 2023 ditinjau dari faktor *enabling* (Sarana dan pelatihan kerja).
- c. Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pelaporan bulanan instalasi rekam medis di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo tahun 2023 ditinjau dari faktor *reinforcing* (SOP dan motivasi).
- d. Menyusun rencana perbaikan terhadap masalah keterlambatan pelaksanaan pelaporan bulanan instalasi rekam medis di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo tahun 2023 menggunakan metode *brainstorming*.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Bagi RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instalasi rekam medis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dalam mengatasi keterlambatan pelaksanaan pelaporan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit.

1.4.2 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai bahan diskusi serta referensi ilmu yang berguna dan bermanfaat dalam pembelajaran maupun penelitian selanjutnya, terutama di bidang rekam medis dan informasi kesehatan khususnya bagian pelaksanaan pelaporan rumah sakit.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan terutama pada bagian pelaporan yang ada di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.
- b. Mengetahui dan menganalisis jumlah laporan bulanan yang mengalami keterlambatan setiap bulannya dan faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan yang terjadi di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.
- c. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan lapangan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.